

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil atau produk yang dikeluarkan oleh BPK-RI adalah laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga negara. BPK-RI merupakan suatu Badan yang bertugas memeriksa tanggung jawab Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI. Dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan yang merupakan lembaga yang independen dan profesional.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan perwakilan BPK RI yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan audit yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pengelolaannya telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Visi :

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Tujuan Strategi BPK adalah mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal tersebut dapat terwujud dengan cara meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemilik kepentingan ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

BPK-RI menghasilkan laporan yang berupa laporan hasil pemeriksaan pemerintah, baik daerah maupun pusat. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan

laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Laporan keuangan merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan kinerja merupakan laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan aspek ekonomi dan aspek efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.(www.bpk.go.id)

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat agar terciptanya tata pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka dalam pengelolaan keuangan negara dibutuhkan lembaga/badan independen untuk dapat melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara seorang auditor dapat bersikap objektif terhadap semua kegiatan yang diperiksa dan bertindak secara independen. Seorang auditor dituntut untuk dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan standar aktif yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar auditor dalam bekerja mampu meningkatkan kinerjanya.

Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan Robbins (2008), Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan auditor telah memenuhi standar audit yang berlaku maka akan menghasilkan kinerja yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas diharapkan agar auditor dapat melaksanakan audit seperti yang direncanakan dan sesuai dengan standar audit.

Kinerja auditor sangat ditentukan dari hasil audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Keberhasilan dan kinerja seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara sangat ditentukan oleh adanya peningkatan kepuasan kerja, profesionalisme auditor, komitmen organisasi, dan penerapan teknologi informasi. Peningkatan kepuasan kerja bagi auditor berkaitan dengan pemenuhan harapan kerja dalam melakukan pemeriksaan. Banyaknya pemeriksaan yang dilakukan (*overload*) dan risiko yang dihadapi auditor dalam melakukan audit, menjadikan seorang auditor sukar untuk dapat mencapai tingkat kepuasan kerja.

Seorang auditor mempunyai tingkat kepuasan kerja tinggi akan menunjukkan kinerjanya dengan baik pula. Menurut Sutrisno (2009:79) karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku negatif dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan frustrasi, sebaliknya karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat berprestasi lebih baik dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. Salah satu mempertahankan karyawan adalah dengan cara memperhatikan kepuasan kerjanya. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang bersifat individual, dengan tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Menurut Robbins dan Judge (2009:120) yang mengatakan "*happy workers are productive workers*" yang berarti bahwa seorang pekerja yang menyukai akan pekerjaannya maka akan meningkatkan kinerjanya.

Menurut Herawati dan Susanto (dalam Arfan 2010) bahwa semakin meluasnya kebutuhan jasa professional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Auditor yang mempunyai profesionalisme yang tinggi akan berdampak pada kinerja auditor dan profesionalisme yang dimiliki auditor menjadi begitu penting untuk diterapkan dalam melakukan pemeriksaan karena memberi pengaruh pada peningkatan kinerja auditor. Harapan masyarakat

terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesionalisme sehingga masyarakat dapat menilai kinerja auditor.

Menurut Shaw, Delery dan Abdulia dalam Vidiasta, (2010:12) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah hasil dari investasi atau kontribusi terhadap organisasi atau suatu pendekatan psikologi yang menggambarkan komitmen sebagai suatu hal yang positif, keterlibatan yang tinggi, orientasi intensitas tinggi terhadap organisasi. Definisi yang sering disebutkan adalah pengertian komitmen organisasi menurut Mowday dalam Sopiha, (2008 : 155) yaitu keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi, keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan Teknologi Informasi oleh auditor akan memberikan kemudahan serta mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan, dengan demikian akan memberikan manfaat dalam peningkatan kinerjanya. Menurut Muhammad Arfan (2010) bahwa Penerapan teknologi informasi bagi auditor akan memberikan manfaat bagi dirinya dan pekerjaannya, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dapat diselesaikan lebih cepat dari pekerjaan yang dilakukan secara manual. Keberhasilan dari proses penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan kinerja auditor. Keberhasilan kinerja auditor juga tidak terlepas dari tersedianya teknologi informasi (IT) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

Dalam melaksanakan audit, auditor berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian intern dimana pada saat ini auditee sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda. Menurut Budi (2008) auditor akan berhadapan dengan keberadaan sebuah pengendalian sistem manual. Dalam proses pengembangan sebuah sistem, maka diperlukan pengendalian lewat berbagai '*testing program*' yang mungkin tidak ditemui dalam sistem manual. Perangkat keras maupun lunak terus berkembang secara tepat seiring perkembangan teknologi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan waktu antara teknologi yang dipelajari oleh auditor dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Oleh karena itu auditor harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Tetapi dalam pelaksanaan audit, auditor diharapkan dapat menerapkan teknologi informasi dalam melakukan proses pemeriksaan agar pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan. Apabila laporan hasil audit yang disajikan tidak terlambat dan berkualitas, tentu hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja auditor. Selain itu, dengan adanya penambahan perangkat teknologi informasi dan berbagai pelatihan diharapkan kepada auditor agar teknologi informasi yang ada bukan hanya mampu digunakan namun mampu diimplementasikan dalam melakukan pemeriksaan. Kesuksesan dari pelaksanaan audit akan mampu meningkatkan kinerja auditor Menurut Arfan, (2010)

Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2010 tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak yakni seperti kasus yang menimpa auditor BPK Bagindo Quirono sebagai tersangka. Bagindo Quirono diindikasikan telah menerima suap dari mantan pejabat Depnakertrans Bahrudin Effendi sebesar Rp 650.000.000 (Kompas.com). Tidak hanya itu adapun ditemukan fenomena khusus yang terjadi di BPK RI Provinsi Perwakilan Jawa Barat.

Kasus korupsi yang melibatkan oknum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terjadi di Kota Bekasi. Walikota Bekasi Mochtar Mohammad telah melakukan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuapan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Untuk mendapatkan Adipura tersebut Walikota Bekasi menyuap auditor BPK sebesar Rp 200 juta untuk memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat (<http://korupsi.vivanews.com>)

Dengan munculnya kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi dari BPK yang seharusnya sebagai lembaga independen mampu menjaga komitmennya untuk tidak terlibat dalam KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, kesalahan prosedur, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Oleh

karenanya, dengan tuntutan tersebut auditor BPK RI mulai meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat dilihat auditor yang mampu untuk menemukan dan melaporkan temuan-temuan yang merugikan Negara.

Temuan lain terjadi pada Pemkab Cianjur dimana BPK RI provinsi Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2011 memastikan tentang adanya penyalahgunaan wewenang serta jumlah bukti-bukti fiktif perihal penggunaan dana kegiatan Kepala Daerah (KDh)/wakil kepala daerah (WKDh) tahun anggaran 2007-2010. Kasus tersebut terjadi karena adanya korupsi Mamin (Makan-Minum)-Gate Pemkab Cianjur senilai Rp 6 miliar lebih. Dengan tersangka yaitu Mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Cianjur Edi Iryana dan Kasubag Rumah Tangga Heri Khaeruman. Tim audit menemukan beberapa penyimpangan tersebut diantaranya dibuat atas kondisi tidak sebenarnya, mulai kuitansi, nota, dan faktur. Ada juga bukti penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja-ref) fiktif karena uangnya cair tapi pelaksanaannya tidak ada. (Pikiran rakyat online)

Selain itu, temuan penyimpangan terjadi di Pemkab Karawang pada tahun 2012. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Karawang dalam pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari ketentuan. Serta terdapat nilai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 500 miliar hal tersebut bukanlah sebuah prestasi, namun salah satu bentuk kegagalan dari Pemkab Karawang dalam merealisasikan pembangunan dan Pemkab Karawang harus mengembalikan pembayaran yang lebih karena pengerjaannya tidak sesuai spek itu semuanya ditanggung oleh pihak ketiga sebagai rekanan dari Pemkab. (Pikiran rakyat online)

Sebagai konsekuensi profesional, auditor harus menjunjung tinggi kode etik profesinya. Dengan memahami dan menerapkan kode etik profesi, maka pelaksanaan kinerja profesional sesuai dengan tujuan penugasan sehingga kinerja optimal dapat dicapai. Jadi, dapat dikatakan peningkatan kinerja auditor tersebut tidak hanya disebabkan oleh tuntutan masyarakat namun disebabkan juga karena auditor BPK RI, telah menerapkan kode etik yang mengatur etika profesi mereka secara baik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul ***“Pengaruh kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi terhadap kinerja Auditor” (Studi kasus pada Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat )***

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, penulis akan mengemukakan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penelitian, yaitu :

1. Bagaimana deskripsi responden auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan serta lamanya bekerja ?
2. Apakah pengaruh kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi secara simultan terhadap kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah pengaruh kepuasan kerja secara parsial terhadap kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ?
4. Apakah pengaruh profesionalisme secara parsial terhadap kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah pengaruh komitmen organisasi secara parsial terhadap kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
6. Apakah pengaruh penerapan pada teknologi informasi secara parsial terhadap kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah tentang :

1. Untuk menganalisis deskripsi responden auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan serta lamanya bekerja.



2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi secara simultan terhadap kinerja auditor pada kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja secara parsial terhadap kinerja auditor pada kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme secara parsial terhadap kinerja auditor pada kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi secara parsial terhadap kinerja auditor pada kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi informasi secara parsial terhadap kinerja auditor pada kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.

### **1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai pengaruh kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi terhadap kinerja auditor. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas

rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), uji validitas dan realibilitas serta teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, dalam penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai hasil analisis pengaruh kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi terhadap kinerja auditor pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Adapun Manfaat-manfaat yang diharapkan tersebut antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi dalam melakukan audit.

2. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah pengetahuan mereka seperti halnya penulis.

3. Bagi Auditor

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta pemahaman mengenai pengaruh kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik terhadap kepuasan kerja, profesionalisme, komitmen organisasi dan penerapan teknologi informasi yang mempengaruhi kinerja, khususnya bagi para mahasiswa, para pendidik mahasiswa, dan para auditor. Juga dapat memberikan pengetahuan tentang profesi auditor dan tidak berpandangan buruk terhadap profesi serta terhadap hasil audit yang dikeluarkan auditor.